



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARGONO
2. Jabatan : POKJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
3. NHK : 156297

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	733.417.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 480 m ² /192 m ² di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m ² /70 m ² di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 104.985.000		
3. Tanah Seluas 1107 m ² di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
4. Tanah Seluas 363 m ² di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 168.432.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	231.400.000
1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 162.000.000		
2. MOTOR, HONDA ADV 150 SEKUTIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000		
3. MOTOR, HONDA SKOPY SEKUTIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.900.000		
4. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	31.900.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.398.927
F. HARTA LAINNYA	Rp.	62.000.000
Sub Total	Rp.	1.063.115.927

**III. HUTANG****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.	112.000.000
Rp.	951.115.927

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.